



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS SISTEM INFORMASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN (SIMRAL) PADA PELAPORAN KEUANGAN REKENING KAS UMUM DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR (BKAD)

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Disusun Oleh :

Amanda Dwi Kurnia
1904431014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JULI 2023

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS SISTEM INFORMASI PERENCANAAN, MONITORING DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN (SIMRAL) PADA PELAPORAN
KEUANGAN REKENING KAS UMUM DAERAH DI BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR (BKAD)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi Keuangan pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh :
Amanda Dwi Kurnia
1904431014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JULI 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Amanda Dwi Kurnia

NIM : 1904431014

Tanda Tangan :

Tanggal : 27 Juli 2023





LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Amanda Dwi Kurnia

NIM : 1904431014

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan (SIMRAL) Pada Pelaporan Keuangan Rekening Kas Umum Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA

Anggota Penguji : Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak, CA, CPIA

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI
JAKARTA

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 Juli 2023

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Sabar Warsini, S.E.,M.M.

NIP.196404151990032002

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Amanda Dwi Kurnia
Nomor Induk Mahasiswa : 1904431014
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan (SIMRAL) Pada Pelaporan Keuangan Rekening Kas Umum Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor

Disetujui oleh :

Pembimbing

Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak, CA, CPIA.

NIP.196901111998022001

Ketua Program Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak.,CTA, CPIA.

NIP. 196302031990031001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada laporan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan secara baik dengan judul “Analisis Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan (SIMRAL) Pada Pelaporan Keuangan Rekening Kas Umum Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor (BKAD)”. Penulisan laporan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

Tidak lepas dari rasa syukur dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini dengan berbagai cara. Pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Bapak Dr.sc., Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing.HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yusep Friya P S, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak, M.M., M.Ak, CA, CPIA. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan serta saran dalam proses penulisan proposal skripsi ini.
5. Bapak Ridwan Zulfi Agha, S.E., M.Ak. Selaku penguji saat sidang seminar proposal yang telah memberikan masukan terhadap kelanjutannya skripsi ini.
6. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. Selaku penguji pada saat sidang akhir yang telah memberikan apresiasi penuh terhadap penulisan skripsi ini.
7. Kepada keluarga khususnya Mama, Papah, dan Kak Asiva yang tidak henti memberikan dukungan serta doa.
8. Veni, Angelica, Farouk, Fanisya dan Jihan yang telah bersedia untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan, menyemangati, mendengarkan keluh kesah, mendoakan, membantu, dan kebersamai dalam penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Devi, Fatimah, dan Restu teman seperbimbingan yang selalu kebersamai dalam menghadapi segala situasi hingga sidang akhir.
10. Seluruh teman-teman program studi AKT 8A 2019 telah berjuang bersama untuk menyelesaikan masa pembelajaran dan proses penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan sehingga jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, dibutuhkannya saran serta masukan yang membangun berdampak terhadap penelitian ini untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca.

Depok, 27 Juli 2023

Amanda Dwi Kurnia





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amanda Dwi Kurnia
NIM : 1904431014
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisis Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan (SIMRAL) Pada Pelaporan Keuangan Rekening Kas Umum Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Tanggal : 27 Juli 2023

Yang menyatakan

Amanda Dwi Kurnia

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Analisis Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan (SIMRAL) Pada Pelaporan Keuangan Rekening Kas Umum Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor

Amanda Dwi Kurnia
Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Badan Keuangan Aset daerah Kota Bogor (BKAD) merupakan induk tata Kelola keuangan daerah kota Bogor, saat ini mengelola keuangan daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan (SIMRAL). Tahun 2021 Kota Bogor melakukan uji coba terhadap aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dirancang dengan 4 portal dalam tata kelola keuangan diantaranya e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting, dan e-Sakip, berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014, dengan turunan pengelolaan keuangan daerah pada PP No. 12 tahun 2019, diikuti oleh ketegasan Permendagri mengenai sistem informasi pemerintahan daerah No. 70 tahun 2019, pemanfaatan teknologi informasi terhadap transparansi, akuntabilitas, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan masyarakat. BKAD mencoba melakukan integrasi SIMRAL dengan SIPD akan tetapi ketidak siapan sistem diintegrasikan berdampak kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalani aplikasi secara bersamaan sehingga keterlambatannya verifikasi RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi tidak optimal, berpengaruh kepada kualitas dalam penerbitan surat perintah dan pencatatan Laporan Keuangan RKUD. Sebagaimana mengacu terhadap RPJMD dalam Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kota Bogor tahun 2019-2024 yaitu, terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (smart e-government), serta terciptanya birokrasi pemerintahan dengan cara penguatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan rekening kas umum daerah Kota Bogor.

Kata kunci : SIMRAL, SIPD, Rekening Kas Umum, Integrasi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Analysis of Planning, Monitoring, Development Evaluation Information Systems (SIMRAL) on Financial Reporting of Regional General Cash Accounts at the Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor

Amanda Dwi Kurnia

D4 Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study describes the application of Accounting Information Systems. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor (BKAD) is the parent of Bogor city regional financial governance, currently managing regional finances using the Development Planning, Monitoring, and Evaluation Information System (SIMRAL) application. In 2021 the City of Bogor is conducting trials of the Regional Government Information System (SIPD) application which is designed with 4 portals in financial management including e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting, and e-Sakip, based on Law no. 23 of 2014, with regional financial management derivatives in PP no. 12 of 2019, followed by Permendagri's strictness regarding local government information systems no. 70 of 2019, the use of information technology for transparency, accountability, accuracy, and speed in decision making and public services. BKAD tries to integrate SIMRAL with SIPD, but the unpreparedness of the integrated system has an impact on the State Civil Apparatus (ASN) running the application simultaneously so that delays in verification of RKA and Budget Implementation Documents (DPA) are not optimal, affecting quality in issuing warrants and reporting Financial Reports RKUD. The term refers to the RPJMD in the Bogor City BKAD Strategic Plan (Renstra) for 2019-2024, namely, the embodiment of smart and serving government (smart e-government), as well as the creation of a government bureaucracy by strengthening information systems in managing general treasury finances for the City of Bogor.

Keyword : SIMRAL, SIPD, General Cash Account, Integration

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Sistem Informasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Sistem Informasi Akuntansi.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Subsistem Sistem Informasi Akuntansi.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Komponen Sistem Informasi Akuntansi.....	Error! Bookmark not defined.
2.5 Aplikasi SIMRAL.....	Error! Bookmark not defined.
2.6 Akuntansi Pemerintahan.....	Error! Bookmark not defined.
2.7 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2.8 Laporan Keuangan Rekening Kas Umum Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2.9 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.10 Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Objek Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Informan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Metode Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....Error! Bookmark not defined.

4.1 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor..... Error! Bookmark not defined.

4.2 Hasil Penelitian.....Error! Bookmark not defined.

4.2.1 Efisien **Error! Bookmark not defined.**

4.2.2 Efektif **Error! Bookmark not defined.**

4.2.3 Akuntabel **Error! Bookmark not defined.**

4.3 Pembahasan.....Error! Bookmark not defined.

4.3.1 Faktor Penghambat Pencapaian BKAD Kota Bogor dalam Pelaksanaan Pembentukan Laporan Keuangan Rekening Kas Umum Daerah dengan Penerapan Aplikasi SIMRAL..... **Error! Bookmark not defined.**

4.3.2 Dampak Penggunaan Aplikasi SIMRAL Dalam Laporan Keuangan Rekening Kas Umum Daerah BKAD Kota Bogor **Error! Bookmark not defined.**

4.3.3 Dampak Integrasi SIMRAL dan SIPD terhadap Pembentukan Laporan Keuangan Rekening Kas Umum Daerah Kota Bogor..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP..... 9

5.1 Kesimpulan.....9

5.2 Saran10

DAFTAR PUSTAKA 12

LAMPIRAN 15



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Surat Keluar Pada Aplikasi SIPD	3
Tabel 1.2 SP2D tahun 2021 pada aplikasi SIPD	4
Tabel 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.2 Laporan Rekonsiliasi Rekening Kas Umum Daerah Kota Bogor..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Daftar Responden Kuesioner	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2 Daftar Rincian Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.1 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor...	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bidang Penatausahaan Keuangan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.3 Hasil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.4 Hasil Responden Penggunaan Aplikasi SIMRAL dan SIPD	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.5 Hasil Responden Menyatakan Aplikasi Belum Optimal	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.6 Hasil Responden SP2D Online Dengan 2 Sistem	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.8 Alur Laporan Keuangan RKUD melalui Aplikasi SIMRAL	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.9 Nilai Pagu Anggaran dan Penyerapan Dana RKUD ..	Error! Bookmark not defined.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara.....	15
Lampiran 2. Dokumentasi dengan Informan Wawancara	22
Lampiran 3. Rekap Mutasi Surat Pada Aplikasi SIMRAL.....	23
Lampiran 4. Tampilan Menu Pada Awal Sistem Aplikasi SIMRAL	24
Lampiran 5. Tampilan Detail Menu Pada Aplikasi SIMRAL.....	24
Lampiran 6. Tempat Berkas Arsip BKAD	27
Lampiran 7. Surat Undangan Rekonsiliasi Laporan Keuangan RKUD	28
Lampiran 8. Berita Acara Rekonsiliasi OPD Dengan BKAD dan BJB	29
Lampiran 9. Menu Penatausahaan Pengeluaran Pada aplikasi SIPD	30





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola keuangan daerah saat terjadinya *Corona Virus Disease 2019* memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat sehingga perangkat daerah melakukan penyaluran berupa uang tunai, jasa, dan barang yang berdampak kepada Laporan Keuangan Rekening Kas Umum Daerah (LK-RKUD) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (bkad.kotabogor.go.id, 2021). Sesuai dengan prinsip dalam penyusunan anggaran meliputi, pendapatan yang terukur secara rasional, pengeluaran didukung oleh penerimaan daerah, serta setiap penerimaan maupun pengeluaran daerah dimasukkan ke APBD dan dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (bkad.kotabogor.go.id, 2021).

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah dibentuk untuk memperlihatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam menunjang keberhasilan daerah (djpk.kemenkeu.go.id, 2017). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam waktu 20 tahun merupakan langkah awal dalam proses perencanaan yang didukung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 tahun. Setelah penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat disusun sebagai uraian dari RPJMD untuk 1 tahun kedepan yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Selanjutnya kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), kemudian setelah disepakati dapat membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pedoman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dapat diterbitkan setelahnya sebagai acuan kepala SKPD sesuai dengan nota kesepakatan, terakhir menyusun rencana aturan daerah mengenai APBD yang akan dievaluasi, kemudian ditetapkan oleh kepala daerah (djpk.kemenkeu.go.id, 2017). Sehingga pemerintah daerah dapat memproses Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan 3 jenis yaitu, Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Langsung (LS), dan ditutup dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantinya berpengaruh terhadap LKRRKUD.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Maka dari itu pemerintah melakukan pengambilan keputusan terhadap penggunaan sistem aplikasi untuk memperbaiki keputusan perencanaan dan layanan terhadap tata kelola keuangan (bkad.kotabogor.go.id, 2021). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai perwujudan tata kelola bidang keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKAD, 2022). Para pengguna sistem dalam aktivitas akuntansi suatu organisasi di internal maupun eksternal akan mendapatkan sebab akibat pada sumber daya ekonomi valid dan dapat mempengaruhi penetapan keputusan (Puspitawati, 2014).

Pemerintah daerah Kota Bogor khusus nya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor melakukan inovasi teknologi terhadap tata kelola keuangan dengan menerbitkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Ver 2.1 yang dibentuk oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dengan landasan mempermudah pengajuan SP2D secara online disahkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (DPBPKD) sehingga dapat digunakan pada tanggal 29 Agustus 2006 untuk membantu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada entitas pelaporan dan akuntansi (www.bpkp.go.id). Tidak hanya itu SIMDA dapat digunakan dalam pengelolaan rekening kas Umum Daerah Kota Bogor dan penyimpanan kelebihan uang kas daerah (www.bappeda.jabarprov.go.id). Namun pengaplikasian SIMDA tidak bertahan lama, teknologi semakin terbarukan pada tahun 2017 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengesahkan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan (SIMRAL) untuk menunjang kinerja daerah terhadap RKUD (www.bappeda.jabarprov.go.id, 2022). Kota Bogor mengimplementasikan SIMRAL pada tahun 2018 secara bertahap karena, SIMDA dinyatakan belum mencukupi kebutuhan tata kelola keuangan pemerintah daerah (Retno, 2019), sedangkan SIMRAL mempunyai kelebihan dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban untuk audit dan pengawas (www.bppt.go.id, 2019).

Tahun 2021 pada saat bersamaan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor melakukan uji coba terhadap aplikasi baru lainnya yaitu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dirancang dengan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

ketentuan 4 portal terpadu dalam tata kelola keuangan pemerintahan diantaranya *e-Planning*, *e-Budgeting*, *e-Reporting*, dan *e-Sakip*, guna untuk menjalankan amanat pemerintah daerah Undang-undang No. 23 tahun 2014, dengan turunan pengelolaan keuangan daerah pada PP No. 12 tahun 2019, diikuti oleh ketegasan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai sistem informasi pemerintahan daerah No. 70 tahun 2019 dinilai telah mendukung pemanfaatan teknologi informasi terhadap transparansi, akuntabilitas, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan maupun pelayanan masyarakat (bkad.kotabogor.go.id, 2021).

Pada saat BKAD mencoba untuk melakukan integrasi SIMRAL dengan SIPD pada tahun 2021 adanya ketidaksiapan sistem untuk diintegrasikan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalani 2 aplikasi secara bersamaan berdampak terhadap keterlambatan verifikasi RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga ASN tidak dapat melakukan verifikasi secara optimal, hal ini berdampak kepada kualitas dalam penerbitan surat perintah dan pencatatan terhadap RKUD (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKAD, 2022).

Tabel 1.1 Jumlah Surat Keluar Pada Aplikasi SIPD

Jenis Surat	Jumlah Surat Keluar		Total Nilai	
	2021	2022	2021	2022
Surat Penyediaan Dana (SPD)	85	60	Rp2.841.609.070.361	Rp3.184.747.280.169
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	12.461	7.345	Rp1.520.864.715.481	Rp1.353.125.676.355
Surat Perintah Membayar (SPM)	13.690	7.200	Rp1.579.752.549.528	Rp1.364.004.630.954
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	12.822	5.859	Rp1.579.752.549.528	Rp1.364.004.630.954
Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	1.917	17.420	Rp14.064.337.367	Rp170.739.909.957

Sumber : SIPD (<https://sipd.kemendagri.go.id/siap>), data diolah (2023)

Tabel 1.1 dapat diartikan bahwa di tahun 2021 pengajuan SPD, SPP, SPM, SP2D oleh OPD terhadap BKAD sangat tinggi sedangkan pada saat SPJ harus diserahkan kepada BKAD oleh setiap OPD hanya sedikit yang melakukannya, hal itu berbanding terbalik dengan tahun 2022. Sebagaimana dalam penyajian laporan keuangan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

2006 mengenai aturan keuangan daerah bahwa, siklus keuangan daerah dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan menyajikan sistem serta prosedur keuangan daerah. Hal ini dapat terlihat karena penggunaan sistem informasi akuntansi yang merupakan suatu sumber daya teknologi untuk mengolah data keuangan dan menyajikan sebuah informasi terbaru (Bodnar dan Hopwood, 2013).

Hal ini disebabkan terjadinya pergantian dan penggabungan sistem dalam jangka waktu cukup dekat sehingga timbul permasalahan yang dialami pada setiap OPD. Berdasarkan hasil observasi dan studi kasus yang terjadi di lapangan SIMRAL membutuhkan penyesuaian terhadap *mapping code* rekening dengan BPPT karena terdapat sistem pendukung lainnya untuk membantu pengesahan SP2D yaitu SIPD sehingga timbul suatu permasalahan yaitu, tidak tertibnya OPD dalam menginput data pada kedua aplikasi sehingga berdampak buruk dalam kinerja ASN, pada dua user yang berbeda dapat melakukan verifikasi dokumen SP2D OPD secara bersamaan sehingga menimbulkan SPM ganda dengan nomor berbeda, verifikasi tidak secara *real time*, dan pada akhir bulan BKAD melakukan rekonsiliasi rekening kas seluruh OPD dengan laporan rekonsiliasi bulanan tercatat secara manual yang bekerja sama dengan Bank Jawa Barat (BJB), mengakibatkan terdapat SP2D yang belum diverifikasi dalam aplikasi SIPD.

Tabel 1.2 SP2D tahun 2021 pada aplikasi SIPD

Kategori SP2D	Jumlah SP2D	
	2021	2022
SP2D Diverifikasi	9.536 Surat	5.514 Surat
SP2D Belum Diverifikasi	1.891 Surat	330 Surat
SP2D Batal	1.395 Surat	15 Surat

Sumber : Aplikasi SIPD (<https://sipd.kemendagri.go.id/siap>), data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 ASN mengalami kesulitan dalam manajemen waktu untuk mengoperasikan 2 aplikasi secara bersamaan sehingga berdampak kepada penerbitan surat yang dilakukan tidak sesuai antara aplikasi SIMRAL dan SIPD sehingga hanya 85% surat diterbitkan secara *real time*. Menurut penelitian Amanuha, (2021) menunjukkan digitalisasi pemerintahan melalui implementasi SIMRAL dalam pembangunan daerah merupakan hal utama bagi pemerintahan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

dengan tujuan terbentuknya SDM berkualitas unggul, terkait dengan hal tersebut pemerintah memiliki tujuan terhadap penunjangnya tata kelola daerah. Namun terdapat kelemahan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap OPD dan SDM belum cakap pada bidang digital yang dilansir pada penelitian Bahty (2018). Disisi lain terdapat pernyataan bahwa Kota Bogor meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 tahun berturut-turut hingga tahun 2022 yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI (kotabogor.go.id, 2022).

Untuk dapat memiliki pembukuan RKUD yang baik menjadi salah satu unsur nya adalah masyarakat yang memiliki kemampuan pada bidang digital sebagaimana dapat menjadi *agent of change* (Dhamayanti, 2019). Pada saat aplikasi SIMRAL diimplementasikan, sebagian besar ASN OPD belum paham akan peraturan pada aplikasi tetapi user yang dimiliki dapat digunakan untuk mengakses, mengajukan SP2D dan dapat memantau aktifitas OPD, sehingga masyarakat dapat menilai kekurangan dan kelebihannya. Sebagaimana hal ini mengacu terhadap RPJMD dalam Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kota Bogor tahun 2019-2024 yaitu, terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (*smart e-government*), terciptanya birokrasi pemerintahan dengan cara penguatan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKAD, 2022). Maka dari itu analisis Aplikasi SIMRAL melalui Laporan Keuangan Rekening Kas Umum Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor dapat dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Sebagai induk penata kelolaan laporan keuangan daerah Kota Bogor, BKAD berperan dalam pengesahan rancangan kegiatan OPD yang dipertanggungjawabkan setiap akhir bulan dengan melakukan rekonsiliasi terhadap LKRKUD. Setelah adanya aplikasi SIMRAL yang bersinergi dengan SIPD untuk menunjang kinerja dalam penerbitan surat yang nantinya akan dibukukan ke dalam LKRKUD bahwa belum sepenuhnya dapat dinyatakan bekerja secara efektif. Disebabkan oleh keterbatasan waktu, di sisi lain menyebabkan peningkatan pekerjaan ASN terhadap penggunaan 2 aplikasi secara bersamaan pada saat verifikasi dan penerbitan surat yang diajukan oleh OPD Kota Bogor.

Sehingga dapat diartikan BKAD kesulitan dalam mengoptimalkan sinergitas SIMRAL dan SIPD yang menyebabkan penurunan terhadap kinerja Laporan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

keuangan RKUD dan ASN, hal ini dapat diperbaiki oleh peranan masyarakat sebagai *agent of change* (Dhamayanti, 2019) terhadap perbaikan *mapping code* rekening SIMRAL sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam pembukuan LKRKUD. Apabila terdapat permasalahan teknis internal yang sama tanpa adanya perbaikan secara tidak langsung dapat mempengaruhi penilaian publik terhadap BKAD dalam penerapan aplikasi SIMRAL sehingga citra kinerja BKAD dapat menurun selaku bagian dari induk keuangan Kota Bogor dalam mencerminkan Laporan keuangan RKUD yang baik (kotabogor.go.id, 2022).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian diputuskan dan ditetapkan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Faktor apa yang dapat menghambat pencapaian BKAD Kota Bogor dalam pelaksanaan pembentukan laporan keuangan rekening kas umum daerah dengan penerapan aplikasi SIMRAL ?
2. Bagaimana dampak terhadap laporan keuangan rekening kas umum daerah BKAD Kota Bogor melalui penggunaan aplikasi SIMRAL ?
3. Bagaimana dampak dari integrasi SIMRAL dan SIPD terhadap pembentukan laporan keuangan rekening kas umum daerah BKAD Kota Bogor ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang ditemui adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis faktor penghambat dalam pembentukan laporan keuangan rekening kas umum daerah dengan penerapan aplikasi SIMRAL di BKAD Kota Bogor.
2. Mengevaluasi dampak terhadap penerapan aplikasi SIMRAL pada laporan keuangan rekening kas umum daerah BKAD Kota Bogor.
3. Mengevaluasi dampak integrasi antara aplikasi SIMRAL dengan SIPD dalam pembentukan laporan keuangan rekening kas umum daerah BKAD Kota Bogor.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



1.5 Manfaat Penelitian

Setelah berhasil mencapai tujuan dalam penelitian diharapkan menimbulkan suatu manfaat dari penelitian ini secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak :

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, yaitu menjadi suatu evaluasi terhadap pengimplementasian aplikasi SIMRAL, sehingga dapat mempermudah dan menjadi lebih maksimal dalam penerbitan SP2D online untuk LKRRKUD.
2. Penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan aplikasi SIMRAL dan juga memperbaiki integrasi terhadap SIPD, sebagai pertimbangan sistem dalam penerbitan SP2D secara *real time*.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki hasil yang dapat menambah gambaran pengetahuan kepada masyarakat umum dan OPD terkait pengajuan SP2D secara *online* melalui aplikasi SIMRAL.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada laporan skripsi ini dapat menggambarkan alur terhadap penelitian yang dilakukan, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan menggambarkan tentang pendahuluan dalam penelitian mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, pertanyaan permasalahan, tujuan serta manfaat secara praktis dan teoritis dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka membahas mengenai teori dasar mengenai sistem informasi, sistem informasi akuntansi, akuntansi, akuntansi pemerintah, pelaporan keuangan daerah, laporan rekening kas umum daerah, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

BAB 3 Metode Penelitian mengenai jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, metodologi pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data informan dan analisa data.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan penelitian ini berisikan data-data yang diuraikan dalam bentuk naratif dengan disimpulkan menjadi satu rangkaian berdasarkan penelitian telah berlangsung dan adanya pembahasan permasalahan setelah diteliti lebih dalam.

BAB 5 Penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil akhir pembahasan pada rangkaian penelitian yang telah diselesaikan sebagai bentuk kontribusi nyata atau terapan yang menjadi suatu pilihan untuk instansi maupun penelitian berikutnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan analisis aplikasi SIMRAL pada laporan keuangan RKUD sebagai berikut:

- a. Dapat dilihat bahwa semua nilai yang terkandung dalam PP No. 12 tahun 2019 sudah terpenuhi namun belum secara optimal. Pada tahun anggaran 2021 sudah menerapkan aplikasi SIMRAL dengan kondisi covid-19 yang berdampak terhadap lonjakan permintaan dana yang cukup tinggi sehingga UP, GU, TU, SP2D harus segera diterbitkan, dimana hal ini bertepatan dengan PP No. 12 tahun 2019, turunan dari pemerintah daerah Undang-undang No. 23 tahun 2014 untuk mengimplementasikan sistem baru yaitu aplikasi SIPD. Sedangkan Kota Bogor meraih WTP selama 6 kali pada pemeriksaan BPK artinya pada saat SIPD diintegrasikan laporan keuangan terbentuk secara tidak maksimal.
- b. Hingga saat ini masih diperlukannya perbaikan terhadap sistem diantaranya, pada saat melakukan rekap bulanan tidak secara manual, penginputan aset melalui SIMASDA diharapkan dapat terintegrasikan dengan SIMRAL, terdapat pengaturan terhadap sistem apabila terjadi salah *input* dokumen, saldo akhir LKRKUD dengan rekening koran melalui aplikasi SIMRAL belum optimal, dan *human error* yang terjadi karena keterbatasan waktu serta tenaga kerja.
- c. Dengan keterbatasan SIPD saat pembentukkan laporan keuangan RKUD tahun anggaran 2021, seluruh SKPD di Kota Bogor mengimplementasikan aplikasi SIMRAL kembali, selepas dengan banyak nya ketidak siapan aplikasi SIPD. Modul menu yang tidak terintegrasikan pada aplikasi SIPD membuat pekerjaan yang dilakukan pada aplikasi SIMRAL berulang kembali, menjadi hambatan *e-government* pada efektivitas OPD dalam penyusunan laporan keuangan nantinya berdampak terhadap laporan pertanggungjawaban yang diterbitkan oleh BKAD selaku induk dari tata kelola keuangan daerah.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap penelitian ini yaitu, selama penelitian ini berlangsung masih terdapatnya keterbatasan dengan tidak adanya keterlibatan sudut pandang pihak bidang lainnya seperti aset, anggaran, dan sekretariat, maka dari itu diharapkan penelitian berikutnya dapat melakukan penambahan informan yang melibatkan seluruh pengguna aplikasi SIMRAL, nantinya hasil penelitian memiliki jangkauan informasi yang lebih luas, tidak hanya bidang penatausahaan keuangan dan pihak yang bertanggung jawab atas aplikasi SIMRAL saja. Berikut terdapat saran serta masukan yang dapat diberikan sesuai dengan hasil pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi bidang penatausahaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
 - a) BKAD tetap melakukan rekonsiliasi secara mandiri agar setiap OPD yang menyusun perencanaan anggaran hingga pembentukkan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan nantinya dapat memahami sistem aplikasi pada siklus akuntansi.
 - b) Penggunaan 2 sistem aplikasi secara bersamaan tidak perlu dipaksakan apabila belum adanya integrasi yang optimal karena, hal ini akan membuat dampak terhadap timbulnya nominal rekayasa dalam penginputan pada pembentukkan laporan keuangan untuk menyamakan saldo yang ada di rekening koran bank BJB.
 - c) Diperlukan pemeriksaan BKAD pada akhir periode oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bukan lagi dengan BPK sehingga pemeriksaan akan lebih mendalam dan detail, karena telah 6 tahun dinyatakan WTP oleh BPK.
2. Bagi pihak pengembangan aplikasi SIMRAL
 - a) Bagi pihak pengembangan aplikasi dapat memberikan kontrol untuk *login* hal ini mencegah resiko terhadap data yang di input oleh user lain atau mengganti pin user secara bertahap yaitu satu semester sekali.
 - b) Adanya kelemahan terhadap sistem aplikasi SIMRAL dan SIPD maka diharapkan SDM pemda diberikan pencerdasan dan pengembangan *softskill* untuk mengontrol kinerja aplikasi menjadi lebih optimal.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c) Diperlukan *mapping code* untuk menghubungkan aplikasi SIMRAL dengan SIPD sesuai dengan perannya agar saling melengkapi dan mempermudah pembentukan laporan keuangan RKUD.
- d) Laporan keuangan rekonsiliasi RKUD tidak dibentuk secara manual menggunakan *excel*, melainkan telah tersistematis sehingga semua dokumen dapat ditandatangani secara digital.
- e) Diharapkan pencarian selisih pada laporan keuangan OPD dengan rekening koran dapat di *tracking* secara sistematis agar mempermudah OPD dalam mencari selisih.
- f) Keterlibatan pengembang aplikasi (PIC) harus jelas agar mengetahui kelemahan dan cara pengendaliannya, hal ini mempengaruhi perkembangan sistem tahun selanjutnya agar dapat mempertimbangkan pembentukan aplikasi baru, karena lebih baik *database* dan *server* aplikasi SIMRAL dan SIPD menjadi sistem bersifat *single window*, sehingga dapat integrasi yang optimal dapat membentuk tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



DAFTAR PUSTAKA

- Amanuha G, Hasanah B, Sururi A, Sukendar S. (2021). Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau.
- Anon. (2017). Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747>
- A. Muri Yusuf. (2014). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”. Jakarta : prenadamedia group.
- Ayuningtyas, Deddi Nordiawan dan Hertianti (2014). Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bappeda.jabarprov.go.id. (2023). Pemerintah Kota Bogor Tentang <http://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/08/RPJMD-Kota-Bogor-Tahun-2019-2024.pdf>
- Bappeda.jabarprov.go.id. (2023). BAPPEDA JABAR Tentang Penjelasan Aplikasi SIMRAL. <http://bappeda.jabarprov.go.id/galeri/rapat-penjelasan-aplikasi-simral-bppt/>
- Bodnar, George H, Hopwood Wiliam S. 2013. Accounting Information System, Terjemahan A.A Jusuf dan R.M Tambunan, (ed) ke 11. Jakarta: Salemba Empat
- Bogor, B. (2019). BKAD Kota Bogor Tentang SIPD. <https://bkad.kotabogor.go.id/index.php/welcome/video/index/24>
- Bogor, B. (2022). BKAD Kota Bogor Tentang LKIP. https://bkad.kotabogor.go.id/imgup/web/data_dinamis/075210.pdf
- Cushing, Barry E. 2013. Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan, Diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih. Erlangga, Jakarta.
- Dipayana M, Triyuwono I, Andayani W. (2017). Journal of Accounting and Business Education, Vol 1(1).

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dhamayanti, D.P., Budiati, A. and Fuad, A. (2019). Analisis Penerapan SIMRAL Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Fahmi Sani B. (2017). Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor dan Faroby Falatehan Dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planing H, Fahmi Sani B, Faroby Falatehan A.

Harnengsih S, . I, . H. (2018). Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 13(2).

Hutama, R. C., & Trisnawati, R. (2017). Pengaruh keterlibatan pemakai sistem, program pelatihan dan pendidikan, kemampuan teknik personal, dukungan manajemen puncak, dan formalisasi pengembangan sistem informasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di Bank Umum kota Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Indrayanti. (2016). Sistem Informasi Akuntansi (Teori Dan Konsep Desain SIA). Malang: Aditya Media Publishing.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Media, 4. (2019). Dukung Proses Pembangunan Daerah, BPPT Implementasikan Aplikasi SIMRAL, from <https://www.bppt.go.id/berita-bppt/dukung-proses-pembangunan-daerah-bppt-implementasikan-aplikasi-simral>

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 110. (2021), tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor .

Puspitawati, lilis dan Sri Dewi Anggadini. (2014). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sophian, S. (2016). Sistem Informasi Pengolahan Data Pada Koperasi Rezeky. Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Romney M.B., & Steinbart, P.J. (2015). Accounting information systems (edisi ke-10). New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Siyoto, S. & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta.

Sekaran, Uma & Roger Bougie. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian. Jakarta: Salemba Empat.

Wiguna, A. (2021). Pemerintah Kota Bogor. Retrieved 1 January 2023, from [https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/100756/bppt-paparkan-
implementasi-simral](https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/100756/bppt-paparkan-implementasi-simral)

Wiguna, A. (2021). Pemerintah Kota Bogor. Retrieved 4 April 2023, from [https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/101800/6-kali-beruntun-
raih-wtp-kota-bogor-raih-penghargaan-dari-kemenkeu](https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/101800/6-kali-beruntun-raih-wtp-kota-bogor-raih-penghargaan-dari-kemenkeu)

Wiguna, A. (2021). Pemerintah Kota Bogor. Retrieved 4 May 2023, from <https://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/52/opd>

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara

Informan 1 : Dhimas Feby Purwanto A.Md

Jabatan : Staff Pelaksana Perbendaharaan Keuangan

Kode : IF1

Kode	Transkrip Wawancara
Q1.4	Mengapa pembentukan Laporan Rekonsiliasi RKUD masih terbentuk secara manual ?
IF1-1.4	Laporan rekonsiliasi RKUD dibuat dengan menggunakan <i>excel</i> dengan cara menarik nominal yang terlampir pada aplikasi SIMRAL, hal ini dilakukan karena untuk memudahkan BKAD dalam rekon dan sebagai arsip juga, karena dapat dilihat secara keseluruhan pergerakan setiap OPD sudah melakukan pencatatan atau belum setelah menggunakan dana anggaran yang diberikan, agar nantinya saat membentuk laporan pertanggungjawaban atau meminta tambahan dana lebih mudah karena saldo yang ada di SIMRAL dengan rekening koran sudah sesuai.
Q1.5	Selama tahun 2021, dengan adanya integrasi 2 aplikasi apa saja yang mengganggu proses pembentukan laporan keuangan BKAD ?
IF1-1.5	Di tahun 2021 menu modul SIPD yang belum rampung dan terlalu memaksa untuk digunakan, tidak hanya itu aplikasi ini diwajibkan untuk diimplementasi seluruh Indonesia akan tetapi tidak terdapat pelatihan terlebih dahulu sebelumnya
Q1.6	Bagaimana efisiensi dan keefektifan waktu yang menunjang pembentukan laporan keuangan RKUD pada setiap OPD oleh BKAD ?
IF1-1.6	Sudah mencukupi point tersebut tetapi kurang optimal saja dalam mengintegrasikannya karena pihak Kemendagri yang belum membuka ruang untuk menu modul yang dibutuhkan oleh setiap bidang-bidang yang ada di aplikasi SIPD. Sehingga sampai saat ini SIMRAL yang membantu kota Bogor dalam meraih WTP sebanyak kurang lebih 6 kali
Q2.6	Apakah pada saat BKAD Kota Bogor melakukan integrasi terhadap sistem SIMRAL dengan SIPD berjalan dengan lancar ?
IF1-2.6	Tahun 2021 tidak berjalan dengan lancar mengakibatkan laporan keuangan harus disusun ulang dengan waktu yang singkat menggunakan aplikasi SIMRAL karena pada saat itu SIPD tidak memiliki menu modul penatausahaan keuangan
Q2.8	Apa yang diinginkan oleh pelaksana terhadap kinerja aplikasi SIMRAL dan SIPD kedepannya ?
IF1-2.8	Kalau bisa nanti si tidak perlu pembentukan sistem baru, lebih baik sistem lama dioptimalkan dengan dibentuknya integrasi yang jelas, seperti halnya saat ini SIMRAL dan <i>cash management</i> (aplikasi bank jabar) sudah terintegrasi, apabila SIMRAL dan SIPD dilakukan integrasi yang optimal dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Q3.3	Bagaimana terhadap kualitas SDM setelah melaksanakan pelatihan dan pengembangan aplikasi SIMRAL ?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

IF1-3.3	SDM saat ini sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan adanya pelatihan dan diskusi rutin oleh BKAD menjadi suatu kemajuan terhadap OPD, tetapi suka terjadi kesalahan dalam pengetikan nominal dana yang dicairkan dengan pencatatan di laporannya, kesalahan pada penentuan tanggal misal pada saat dana dicairkan di tanggal 13 seharusnya pada saat dana telah dipakai dan akan di catat tanggalnya maju ke tanggal 14 atau 15 ini malah di tanggal yang sama. Jadi nya harus dimulai dari awal lagi.
Q4.1	Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di BKAD Kota Bogor dalam mendorong penerapan sistem ?
IF1-4.1	BKAD sudah menyediakan semua sarana dan prasarananya dari elektronik seperti laptop, komputer, jaringan internet, dan lainnya tidak hanya itu BKAD juga memfasilitasi diskusi terhadap OPD apabila terdapat permasalahan dalam sistem, menggunakan sistem untuk mengetahui penilaian setiap kinerja OPD, saat ini dilakukan rekonsiliasi mandiri setiap bulannya agar OPD lebih memahami pembentukan pelaporan keuangan secara sistem dan tanda tangan sudah digital.

Informan 2 : Mohamad Irfan Setiawan S.Sos.

Jabatan : Staff Pelaksana Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Kode : IF2

Kode	Transkrip Wawancara
Q1.9	Apakah ada surat terkait SP2D yang belum diterbitkan dalam aplikasi SIMRAL maupun SIPD ?
IF2-1.9	Di tahun 2021 memang banyak surat yang belum diterbitkan dan dibatalkan karena perencanaan anggaran yang diluar dari rencana akibat Covid-19. Sehingga mengakibatkan banyaknya dana yang diajukan tidak cair dan beriringan dengan penggunaan SIPD yang baru 2 bulan berjalan di tahun 2021 tersebut, namun belum secara optimal dan hanya kepala bidang penatausahaan keuangan saja yang memiliki akses terhadap aplikasi SIPD tersebut. Staff pelaksana tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut hanya bermain di SIMRAL saja.
Q1.10	Apakah terdapat pengaruh terhadap laporan keuangan daerah apabila terdapat surat yang belum diterbitkan oleh BKAD ?
IF2-1.10	Untuk tahun 2021 tidak berpengaruh terhadap surat yang dibatalkan atau belum diterbitkan karena SIPD yang belum optimal dipaksakan untuk berjalan tetapi setelah bulan maret BKAD kembali lagi menggunakan SIMRAL tapi pada dasarnya SPD, SPP, SPM, SP2D, dan SPJ terhadap UP,GU,TU jika diterbitkan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan rekening kas umum daerah. Biasanya hal ini terjadi karena OPD salah memberikan tanggal, keterangan dalam kebutuhan dana, nomor rekening penerima dana, dan nominal yang dicantumkan terhadap suratnya, maka dari itu tidak dapat dilakukannya penerbitan atau adanya pembatalan
Q2.2	Siapa yang melakukan pengembangan pada aplikasi SIMRAL ?
IF2-2.2	SIMRAL dibentuk oleh BRIN dan dikelola oleh Diskominfo akan tetapi apabila ingin ada usulan menu terhadap sistem dapat diberitahukan melalui BKAD



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Informan 3 : Qisthina Aditiara S.E.
 Jabatan : Staff Pelaksana Analis Laporan Keuangan
 Kode : IF3

Kode	Transkrip Wawancara
Q1.2	Mengapa untuk penerbitan SP2D online harus dilakukan melalui 2 aplikasi yang diintegrasikan ?
IF3-1.2	Secara keseluruhan si SP2D online lebih bergerak di aplikasi SIMRAL karena pada aplikasi SIPD hanya menjadi sebagai rekaman surat yang telah keluar saja dan yang memiliki akses hanya Kabid penatausahaan keuangan untuk mengkonfirmasi surat yang diajukan oleh OPD dan itupun tidak terintegrasi, lebih tepatnya eksport import data saja karena penginputan dokumen sebagai persyaratan masih manual, kaya gini surat SPM di download dari SIMRAL lalu di input ke menu yang tersedia di aplikasi SIPD.
Q1.4	Mengapa pembentukan Laporan Rekonsiliasi RKUD masih terbentuk secara manual ?
IF3-1.4	Laporan rekonsiliasi yang disusun manual hanya untuk sebagai monitoring BKAD dalam penginputan dana setiap harinya oleh OPD. Akan tetapi apabila sedang dilakukannya rekon sudah tersusun secara sistematis.
Q1.5	Selama tahun 2021, dengan adanya integrasi 2 aplikasi apa saja yang mengganggu proses pembentukan laporan keuangan BKAD ?
IF3-1.5	Karena SIPD tidak ada menu pelaporan keuangannya sehingga mengganggu proses rekon dan pencatatan dalam laporan keuangan rekening kas daerah
Q2.1	Perkembangan apa yang dilakukan terhadap aplikasi SIMRAL ?
IF3-2.1	Dahulu hingga saat ini simral memang tampilannya masih sama saja akan tetapi perancangan pada saat awal itu sekarang sudah dipecah ke SIPD, adanya tanda tangan digital, tidak ada lagi server opd terjadi kendala dengan jangka waktu yang lama. Membantu dalam menyusun laporan keuangan dan dapat tersimpan secara sistematis, pencairan SP2D online menjadi lebih cepat, pada aplikasi SIPD sudah terdapat menu edit apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan SPP atau SPM, SIPD sudah terdapat menu penatausahaan untuk meng-input belanja tetapi belum terdapat output pelaporan, dan lain sebagainya terlepas masih adanya kekurangan pada 2 aplikasi tersebut.
Q2.7	Apakah saat ini BKAD sedang mengembangkan 2 aplikasi tersebut khususnya untuk membantu saat pembukuan RKUD ?
IF3-2.7	Karena SIPD bersifat wajib diterapkan seluruh Indonesia maka dari itu pemerintah kota bogor sudah mengajukan saran kepada BRIN dan Kemendagri terhadap integrasi aplikasi SIMRAL agar pada saat pembentukan laporan keuangan RKUD hingga pertanggungjawabannya dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
Q3.3	Bagaimana terhadap kualitas SDM setelah melaksanakan pelatihan dan pengembangan aplikasi SIMRAL ?
IF3-3.3	SDM sudah mencapai kriteria yang memahami dunia digital, akan tetapi pada saat input angka ada beberapa OPD yang belum mengetahui akun tersebut masuk kemana, atau reklas yang terjadi karena masa waktunya sudah habis atau barang dibawah harga Rp 1.000.000 maka dari itu kita harus tertib dalam

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	aset dan mengetahui asal usul aset diadakan dan landasan nya, agar saat penginputan SIMRAL tidak ada perbedaan dengan rekening koran BJB.
Q4.1	Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia di BKAD Kota Bogor dalam mendorong penerapan sistem ?
IF3-4.1	Dalam sarana dan prasarana BKAD sudah sangat baik ya, semua ASN diberikan fasilitas 1 orang dengan laptop, wifi yang disediakan pada setiap lantai nya sehingga mudah diakses, penanganannya cepat apabila terjadi permasalahan pada sistem, dan melakukan evaluasi serta aktifnya <i>E-Office</i> BKAD untuk mempermudah melakukan pengaduan dan transparansi hasil laporan tahun anggaran yang telah diaudit.
Q5.1	Pilar hukum apa saja yang mendasari penerapan aplikasi SIMRAL di BKAD Kota Bogor ?
IF3-5.1	Kalau ga salah terdapat pada hukum PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perwali Kota Bogor Nomor 180 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.
Q6.2	Bagaimana perkembangan terhadap kanal akses aplikasi SIMRAL dilakukan ?
IF3-6.2	Dulu pada awalnya aplikasi SIMRAL belum selengkap saat ini, baru hanya ada menu perencanaan anggaran hingga perbendaharaan saja belum ada akuntansinya, tetapi lama kelamaan dengan kita mengajukan keinginan dan kebutuhan kita apa saja dalam sistem itu dibikin persis dengan <i>requestnya</i> . Hingga saat ini penerbitan SP2D sudah dilakukan secara online, pembentuk laporan pertanggungjawaban melalui sistem, dan baru beberapa proses penerbitan sudah berupa tanda tangan digital.
Q7.1	Bagaimana pengalokasian ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan penerapan aplikasi SIMRAL ?
IF3-7.1	Tidak ada pengalokasian anggaran terhadap penerapan aplikasi SIMRAL karena SIMRAL dan SIPD merupakan aplikasi yang diberikan secara gratis oleh BRIN dan Kemendagri.

Informan 4 : Samsi Lutfi, S.E.

Jabatan : Kasubid Pengelolaan Perbendaharaan

Kode : IF4

Kode	Transkrip Wawancara
Q1.1	Apakah terdapat permasalahan aplikasi SIMRAL bagi para pengguna?
IF4-1.1	Baru memegang SIMRAL di february 2023 karena sebelumnya pada bidang aset hanya memakai aplikasi SIMASDA dan SIPD perencanaan penganggaran, sejauh ini belum terlihat ada kendala. Rencananya untuk yang akan data SIMASDA akan diintegrasikan dengan aplikasi SIMRAL, agar nanti apabila ada perubahan pada nilai perolehan aset tetap atau koreksi atas persediaan diharapkan dapat ngelink ke SIMRAL untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan.
Q1.3	Mengapa belum adanya mapping code yang baik pada aplikasi SIMRAL?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

IF4-1.3	Karena SIMASDA (aplikasi yang digunakan untuk bidang aset) belum bisa langsung ngelink ke SIMRAL hal ini diinginkan agar tidak terjadi pekerjaan dua kali.
Q1.6	Bagaimana efisiensi dan keefektifan waktu yang menunjang pembentukan laporan keuangan RKUD pada setiap OPD oleh BKAD ?
IF4-1.6	Efektivitas dan efisiensi sudah tetapi kurang optimal saja dalam hal ketidak adanya integrasi yang maksimal sehingga menjadi terhambat dalam penyusunan laporan keuangan yang dibuat secara manual, sehingga pada saat pengecekan tidak sesuai sistem (aset) dan terkadang saldo akhir OPD tidak sesuai dengan rekening koran bank BJB.
Q1.7	Apakah penerapan aplikasi SIMRAL telah memberikan kemudahan bagi pengelola dalam menyampaikan informasi terhadap transparansi dana maupun aset yang dimiliki pada setiap OPD ?
IF4-1.7	Sudah. Ketika dibidang aset lebih menggunakan ilmu manajemen kalau di perbendaharaan yang lebih diutamakan adalah ilmu akuntansi nya bagaimana cara mengelola uang seefektif mungkin dan seefisien mungkin agar pada saat ada belanja pada SKPD uang nya tersedia, mengatur uang tersedia agar tidak terjadinya perubahan secara signifikan, mengatur dari sisi penerimaan juga, misal belanja hari ini 10 tapi penerimaan 15 berarti terjadi kekurangan atau minus, sudah dapat terlihat mutasi hariannya pada aplikasi SIMRAL. Bagaimana belanja tidak melebihi penerimaan, maka harus ada pengelolaan anggaran yang bijak pada kas.
Q1.8	Bagaimana cara menilai jika pembentukan RKUD melalui aplikasi SIMRAL sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat OPD?
IF4-1.8	Terlihat dari SDM hanya kurang memahami ilmu dari dasar penyusunan laporan keuangannya saja, secara sistem OPD sudah menguasai. Seperti halnya di aset adalah kurangnya pemahaman terhadap aturan pengelompokan aset tetap atau aset lancar, kurang memahami peraturan persediaan dan batasan kapitalisasi pengurus barang. Adanya Perwali Nomor 110 tahun 2021 yang terkait kebijakan akuntansi di dalamnya ada Batasan kapitalisasinya. Aset tetap dapat dinyatakan apabila diatas 1jt atau masa manfaatnya lebih dari 12 bulan.
Q1.11	Apabila terdapat kendala pada sistem apakah pihak pengelola responsif ?
IF4-1.11	Lumayan lama, karena alurnya itu dari keluhan yang masuk ditampung terlebih dahulu oleh BKAD kemudian dibentuk SK nya lalu ke kominfo dan baru dikirimkan ke kemendagri, tetapi apabila permasalahan ringan yang bisa ditangani oleh kominfo sangat responsive.
Q2.4	Bagaimana kualitas terhadap aplikasi SIMRAL setelah di kembangkan ?
IF4-2.4	Dulu dari perencanaan hingga pertanggungjawaban ada di aplikasi simral karena sekarang diwajibkan menggunakan SIPD maka dipecah. Perencanaan penganggaran pakai SIPD, penatausahaan dan laporannya di SIMRAL. Awalnya dilakukan perekaman di SIPD penganggaran sampai penetapan pbb baru data diimpor ke SIMRAL agar bisa dilakukan ke penatausahaan hingga pelaporan keuangan. Akan tetapi makin kesini SIPD hanya sebagai perekaman saja sifatnya karena saldo yang diinput oleh OPD ke SIPD apabila disandingkan dengan rekening koran tidak balance.
Q2.6	Apakah pada saat BKAD Kota Bogor melakukan integrasi terhadap sistem SIMRAL dengan SIPD berjalan dengan lancar ?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

IF4-2.6	Secara keseluruhan integrasi sistem belum optimal, alangkah lebih baik semua sistem dapat terintegrasikan. Contoh seperti SIMRAL sebagai induknya, selama ini baru perencanaan dan penganggaran saja yang sudah diintegrasikan, sedangkan pada aplikasi simasda belum sampai ke ekspor impor data aplikasi SIMRAL. Jika sudah terintegrasikan akan lebih nyaman nantinya saat pembentukkan laporan keuangan karena pemerintah pada kolom neraca hampir sekitar 70% aset tetap daerah sisanya kas, utang, dan lainnya.
Q2.8	Apa yang diinginkan terhadap kinerja aplikasi SIMRAL dan SIPD kedepannya ?
IF4-2.8	Lebih memilih mengembangkan dan memperbaiki sistem yang sudah ada daripada membuat sistem baru yang dapat diintegrasikan satu sama lain sesuai dengan kebutuhan masing masing bidang. Di dalam 1 rumah sistem biasanya disebut single window, karena sistem tujuannya untuk mempermudah sajakan.
Q3.1	Apakah terdapat pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BKAD Kota Bogor ?
IF4-3.1	Pembinaan pada bidang aset dilakukan secara intens setiap bulannya, menjadi salah satu syarat agar opd dapat melakukan pencairan UP GU, laporan aset tetap belum rampung disusun maka tidak dapat cairkan, maka harus tertib setiap SKPD. Untuk penatausahaan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan OPD terhadap kas dan pembentukkan laporan keuangan yang baik dan benar.
Q3.3	Bagaimana terhadap kualitas SDM setelah melaksanakan pelatihan dan pengembangan aplikasi SIMRAL ?
IF4-3.3	<i>Human error</i> yang berasal dari ASN itu berada pada kurangnya memahami dan menguasai ilmu akuntansi dan analisa laporan keuangan, dimana nantinya BKAD bertanggung jawab atas monitoring terhadap saldo balance yang tertera antara SIMRAL dan aplikasi <i>Cash Manajement Bank</i> BJB/RKUD
Q6.3	Bagaimana keterlibatannya SDM pada pelaksanaan aplikasi SIMRAL pada RKUD ?
IF4-6.3	SDM di perbendaharaan bagus, karena masa kerja bendahara SKPD rata rata lama sehingga mereka memahami aturan yang terkait mau itu peraturan lama atau terupdate, dibandingkan di aset dan tidak ada batasan jenjang kelulusannya kalau di bendahara itu minimal lulusan D3. sehingga berpengaruh terhadap kinerja OPD.
Q7.2	Anggaran yang digunakan untuk penerapan aplikasi SIMRAL berasal dari mana ?
IF4-7.2	Untuk aplikasi SIMRAL kita mendapatkan secara gratis dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), untuk aplikasi lainnya seperti SIPD kita juga gratis yang didapatkan dari Kemendagri, untuk SIMASDA sebagai penggunaan bidang Aset nya kita memakai jasa konsultan yang dimana dana yang digunakan tersebut berasal dari jatah belanja BKAD dan sudah dianggarkan setiap tahunnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Informan 5 : Achmad Sandy B, S.Kom
 Jabatan : Kabid *E-Government* Diskominfo Kota Bogor
 Kode : IF5

Kode	Transkrip Wawancara
Q1.1	Apakah terdapat permasalahan aplikasi SIMRAL bagi para pengguna?
IF5-1.1	Dulu dari perencanaan musrembang hingga pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban laporan keuangan yang sudah audited ada di SIMRAL. Saat SIPD dipakai maka SIMRAL cutoff semua, tahun 2021 SIPD tidak efektif semua nya kembali lagi ke SIMRAL hal ini dikarenakan modul penatausahaannya ga ada di SIPD.
Q1.3	Mengapa belum adanya mapping code yang baik pada aplikasi SIMRAL?
IF5-1.3	Mapping code disini lebih ke arah dalam integrasi ke aplikasi SIPD karena kita dari kota Bogor sudah meminta kepada pusat untuk segera mengoptimalkan integrasi pada 2 sistem aplikasi ini agar dapat mempermudah dan tidak membuat pekerjaan OPD bertambah dengan adanya <i>double input</i>
Q2.2	Siapa yang melakukan pengembangan pada aplikasi SIMRAL ?
IF5-2.2	Aplikasi terjadi perkembangan karena penambahan modul yang dibutuhkan oleh OPD yang diajukan ke BKAD lalu ditindak lanjuti oleh Diskominfo sebagai penyambung lidah terhadap pihak BRIN, seperti halnya modul yang tersedia pada aplikasi SIMRAL sudah lengkap dari perencanaan hingga pelaporan namun belum optimal, sedangkan pada aplikasi SIPD masih terdapat kekurangan karena tidak adanya modul untuk pelaporan yang artinya bidang penatausahaan keuangan masih belum dapat mengoperasikan sistem tersebut sampai saat ini sedangkan bidang aset dan anggaran telah mengoperasikannya.
Q2.6	Apakah pada saat BKAD Kota Bogor melakukan integrasi terhadap sistem SIMRAL dengan SIPD berjalan dengan lancar ?
IF5-2.6	SIMRAL adalah aplikasi keuangan, Kominfo membagi peran dengan BKAD. BKAD lebih ke arah pengelolaan terhadap aplikasi SIMRAL. KOMINFO tugasnya memastikan aplikasi itu berjalan, menyiapkan infrastruktur dalam artian servernya, perangkat internet pada setiap perangkat daerah, sebagai penyambung kerjasama dengan BRIN juga, dan membuat akun-akun untuk seluruh perangkat daerah yang memiliki tenaga kerja baru atau yang lupa dengan password log-in aplikasi SIMRAL nya. SIMRAL masuk di tahun 2018 dan sudah mulai efektif untuk penggunaan sistemnya karena digunakan sebagai aplikasi pendamping bersamaan dengan aplikasi SIPD wajib diterapkan dari pusat karena semua kabupaten dan kota se Indonesia wajib menggunakan aplikasi ini yang dibentuk oleh Kemendagri. 2 aplikasi ini berjalan berdampingan karena pada modul khususnya penatausahaan keuangan belum ada di SIPD makanya kita pakai SIMRAL juga. Karena SIMRAL itu proses-proses pengajuan dari dinas, proses pencairan ke bank jabar sudah terintegrasi di SIMRAL dengan bank jabar.
Q6.2	Bagaimana perkembangan terhadap kanal akses aplikasi SIMRAL dilakukan ?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

IF5-6.2	Dulu karena keterbatasan OPD pada server dan jaringan sehingga masih belum optimal, beberapa tahun belakangan ini sudah diselesaikan permasalahannya oleh diskominfo dikarenakan memiliki kewajiban membangun jaringan di seluruh OPD. walaupun tidak semua bisa dipegang oleh kominfo seperti sekolah, sekolah ngga bisa dicover untuk pengadaan jaringan internetnya itu pengadaan sendiri. Selama ada internet simral dapat diakses.
Q7.1	Bagaimana pengalokasian ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan penerapan aplikasi SIMRAL ?
IF5-7.1	Semua sistem aplikasi yang digunakan oleh seluruh OPD anggarannya dipertanggungjawabkan oleh DisKominfo. Apabila ada pembentuk modul baru, akun baru, dan pengembangan terhadap sistem sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh OPD. OPD hanya sebagai user pengguna saja

Lampiran 2. Dokumentasi dengan Informan Wawancara



Dhimas Feby Purwanto A.Md, Mohamad Irfan Setiawan S.Sos., dan Qisthina Aditiara S.E.

Staff Pelaksana Penatausahaan Keuangan BKAD



Samsi Lutfi, S.E.

Kasubid Pengelolaan Perbendaharaan (2022/2023)



Achmad Sandy B, S.Kom.

Kabid *E-Government* Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor

Lampiran 3. Rekap Mutasi Surat Pada Aplikasi SIMRAL

No	Nama Dokumen	No Dokumen	Jenis Dokumen	Bidang
1	Surat Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bogor Kepada Bank BRI Tentang Konfirmasi Bank	Nomor 900/137-BKAD/2021	Konfirmasi Bank	Bidang Penatausahaan Keuangan
2	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.655-BKAD/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor	Nomor 900/Kep.655-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
3	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/0401-6.2 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Penerimaan	Nomor 900/0401-6.2 Tahun 2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
4	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-945 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nomor 900.45-945 Tahun 2020	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
5	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.963-BKAD/2021 Tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga	Nomor 900/Kep.963-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
6	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.883.3-BKAD/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor	Nomor 900/Kep.883.3-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
7	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.883.2-BKAD/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor	Nomor 900/Kep.883.2-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
8	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.655-BKAD/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor	900/Kep.655-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
9	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.612.1-Dinkes/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor	Nomor 900/Kep.612.1-Dinkes/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
10	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.546-BKAD/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor	Nomor 900/Kep.546-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
11	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.545-BKAD/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor	Nomor 900/Kep.545-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
12	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.524-BKAD/2021 Tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Sebagai Penanggungjawab	Nomor 900/Kep.524-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
13	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.336-BKAD/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor	Nomor 900/Kep.336-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

14	Surat Walikota Bogor Nomor 900/Kep.151.3-BKAD/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor	Nomor 900/Kep.151.3-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
15	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.157.4-BKAD/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor	Nomor 900/Kep.157.4-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
16	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.157.4-BKAD/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-942 Tahun 2020 Tentang Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021	Nomor 900/Kep.157.4-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan
17	Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900/Kep.157.4-BKAD/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-942 Tahun 2020 Tentang Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021	Nomor 900/Kep.157.4-BKAD/2021	Keputusan Walikota	Bidang Penatausahaan Keuangan

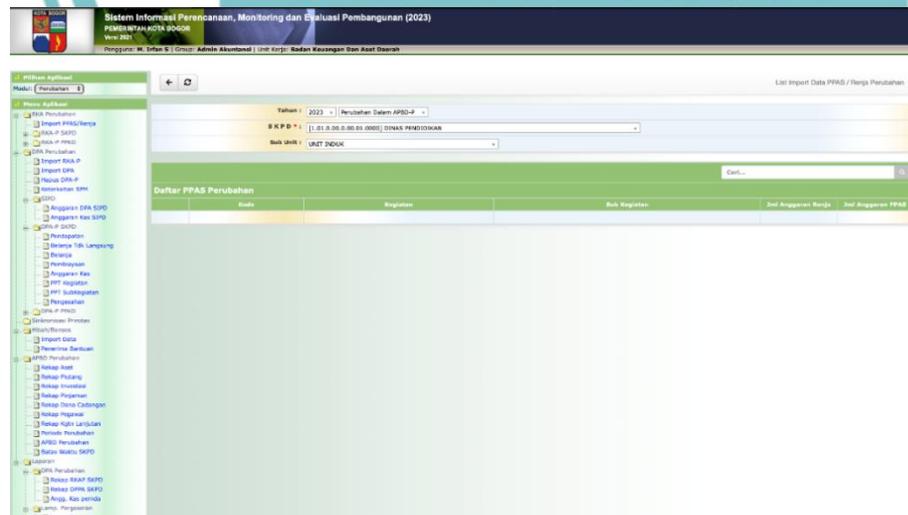
Sumber: Aplikasi SIMRAL (diakses pada 07 Juni 2023)

Lampiran 4. Tampilan Menu Pada Awal Sistem Aplikasi SIMRAL



Sumber: Aplikasi SIMRAL (diakses pada 07 Juni 2023)

Lampiran 5. Tampilan Detail Menu Pada Aplikasi SIMRAL





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The screenshot displays the 'Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (2023)' web application. The interface is in Indonesian and shows various data entry and reporting screens. The top navigation bar includes the system name and user information. The main content area is divided into sections for 'Daftar PPAS Perubahan', 'Pilihan Aplikasi', and 'Pilih Periode'. The bottom section displays a detailed table of financial data with columns for 'No. Surat', 'Tgl. Surat', 'Periode', 'Status', 'Jumlah Page', 'Jumlah Akumulasi', 'Jumlah BPD', 'Jumlah BPD Anggaran', 'Dns', and 'Lampiran'. The table contains several rows of data, including dates and numerical values.



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The screenshots display the following data in the third screenshot (SPD Issuance Plan):

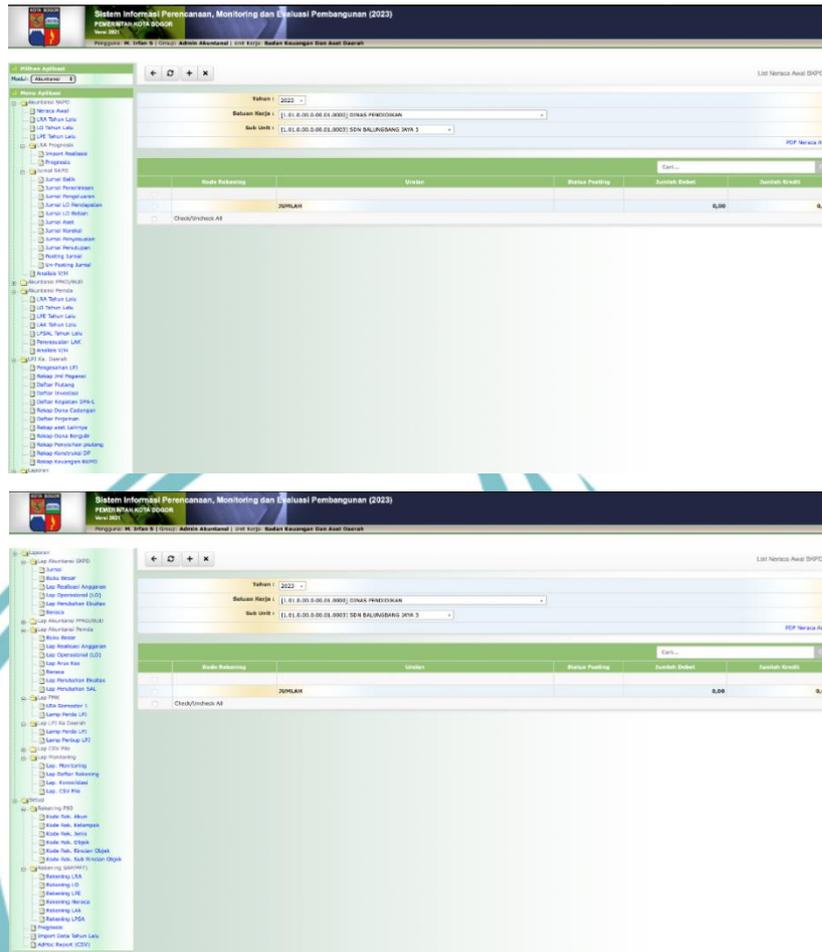
No Urut	No / Tgl SPD	Periode SPD	Status SPD	Jumlah Page	Jumlah Akumulasi SPD	Jumlah SPD	Jumlah Baku Anggaran	Uraian SPD	Lampir SPD
18	02/10/21/0000017/01/00/00/00/0000/PA/0000/02-01-2023	Semester 1 (Januari s.d. Juni) APBD Muara	Final	301.709.848,00	0,00	187.177.948,00	134.621.900,00	PDF	PDF
582	02/10/21/0000017/01/00/00/00/0000/PA/0000/20-01-2023	Semester 1 (Januari s.d. Juni) Pergeseran 1	Final	301.709.848,00	187.177.948,00	0,00	134.621.900,00	PDF	PDF
798	02/10/21/0000017/01/00/00/00/0000/PA/0000/21-01-2023	Semester 1 (Januari s.d. Juni) Pergeseran 2	Final	301.709.848,00	187.177.948,00	0,00	134.621.900,00	PDF	PDF
1.294	02/10/21/0000017/01/00/00/00/0000/PA/0000/22-01-2023	Semester 1 (Januari s.d. Juni) Pergeseran 3	Final	301.709.848,00	187.177.948,00	0,00	134.621.900,00	PDF	PDF



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Sumber: Aplikasi SIMRAL (diakses pada 07 Juni 2023)

Lampiran 6. Tempat Berkas Arsip BKAD





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7. Surat Undangan Rekonsiliasi Laporan Keuangan RKUD

KOTA BOGOR

PEMERINTAH KOTA BOGOR

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No.10 Telp.(0251) 8323099 Fax. (0251) 8323099
BOGOR – 16121

Bogor, 19 Mei 2020 M.
Ramadhan 1441 H.

Nomor : 005/045-BKAD
Lampiran :
Hal : UNDANGAN

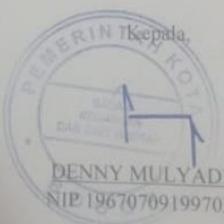
Kepada
Yth. Undangan terlampir.

BOGOR

Dengan ini kami mengharapkan Saudara untuk menugaskan Kasubag Keuangan dan/atau Bendahara pada OPD Penerima BTT serta Bendahara dan Pengurus Barang pada Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 Kota Bogor dalam acara rapat rekonsiliasi progres Penyerapan Anggaran BTT Penanggulangan *COVID 19* yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Mei 2020
Waktu : Pkl. 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat BKAD
Acara :
1. Rekonsiliasi SPJ Kegiatan BTT TA 2020
2. Rekonsiliasi Penerimaan dan Penyaluran Bantuan/Sumbangan pihak ketiga/masyarakat pada Gugus Tugas
3. Perubahan Output Kegiatan DID untuk Covid 19

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

DENNY MULYADI, SE.
NIP.196707091997031006

tembusan disampaikan kepada :
Yth. Bapak Walikota Bogor (sebagai laporan);



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8. Berita Acara Rekonsiliasi OPD Dengan BKAD dan BJB

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 001/BGR-OPS/0810/09-2020

Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 September 2020 telah dilakukan rekonsiliasi terkait kesalahan penginputan setoran pada tanggal 1 September 2020 di bank **bjb** KK DPMPSTP dengan rincian transaksi sebagai berikut:

Transaksi yang dilakukan :

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NOMINAL	NARASI
1	0130270203013	Rekening Kas Umum Daerah Kota Bogor	Rp. 930.000,-	STN O IBAN SUBANDI @930.000. TARIF LISTRIK 310820
2	0009077286001	Rekening Kas Umum Daerah Kota Bogor	Rp. 371.000,-	STN O IBAN SUBANDI @371.000. TARIF NKL 31/08/20

Transaksi seharusnya :

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NOMINAL	NARASI
1	0009077286001	Perumda Pasar Pakuan Jaya	Rp. 930.000,-	STN O IBAN SUBANDI @930.000. TARIF LISTRIK 310820
2	0009077286001	Perumda Pasar Pakuan Jaya	Rp. 371.000,-	STN O IBAN SUBANDI @371.000. TARIF NKL 31/08/20

Berdasarkan rincian tersebut akan dilakukan koreksi dengan jurnal sebagai berikut:

NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NOMINAL	NARASI
0130270203013 (D)	Rekening Kas Umum Daerah Kota Bogor	Rp. 930.000,-	KOREKSI STN O IBAN SUBANDI @930.000. TARIF LISTRIK 310820 TGL 01/09/2020
0009077286001(K)	Perumda Pasar Pakuan Jaya	Rp. 930.000,-	KOREKSI STN O IBAN SUBANDI @930.000. TARIF LISTRIK 310820 TGL 01/09/2020
0130270203013 (D)	Rekening Kas Umum Daerah Kota Bogor	Rp. 371.000,-	KOREKSI STN O IBAN SUBANDI @371.000. TARIF NKL 31/08/20 TGL 01/09/2020
0009077286001(K)	Perumda Pasar Pakuan Jaya	Rp. 371.000,-	KOREKSI STN O IBAN SUBANDI @371.000. TARIF NKL 31/08/20 TGL 01/09/2020

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai laporan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 10 September 2020



Gupadi, SE., Ak., M.Si
Kluta Bendahara Umum
Daerah Kota Bogor



Rudi Setiawan
Manajer Operasional

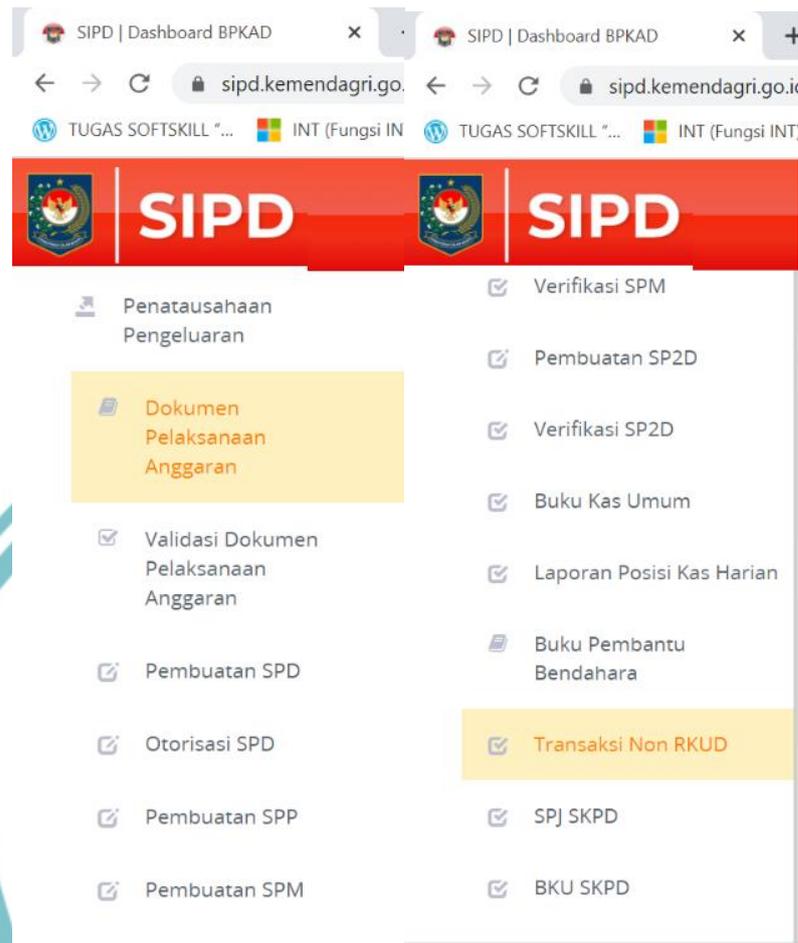


Annisa Atoriyah
Pemimpin Kantor Kas



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9. Menu Penatausahaan Pengeluaran Pada aplikasi SIPD



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA